

BPBD: 2.160 Bencana Landa Kabupaten Bogor Selama 2023

CIBINONG (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 2.160 bencana terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bencana terbanyak yang melanda adalah angin kencang.

"Jumlah kejadian atau peristiwa bencana 2.160, angin kencang atau angin ribut 699 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, dalam keterangannya, Kamis (4/1).

Bencana terbanyak kedua yaitu kekeringan, sebanyak 643 kejadian. Kemudian disusul tanah longsor 487 kejadian, dan bencana lainnya 108 kejadian.

"Banjir 87 kejadian, kebakaran 49 kejadian, pergeseran tanah 44 kejadian,

dan gempa bumi 43 kejadian," terangnya.

Sebanyak 40 kecatatan terdampak bencana tersebut, yang tersebar di 348 desa/kelurahan. Kemudian terdapat 29 orang meninggal dunia selama 2023 karena bencana.

"Korban meninggal 29 orang, luka sedang 6 orang, dan luka ringan 25 orang," ucapnya.

Ade menambahkan, sebanyak 762 warga menungsi akibat bencana selama tahun 2023. Kemudian sebanyak 568.219 warga terdampak.

"Rumah rusak ringan 3.910, rusak sedang 1.214, rusak berat 267, dan terancam 744," pungkasnya. ●gio

Sepanjang 2023, Ada 794 Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Bogor

CIBINONG (IM)- Tercatat, sepanjang tahun 2023 ada 794 kasus HIV dan AIDS terjadi di Kabupaten Bogor. Penyakit ini diidap oleh rata-rata usia produktif, yaitu 25 hingga 45 tahun.

Kadinkes Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina mengatakan, dari 89.122 tes yang dilakukan, tercatat ada 794 orang yang terindikasi positif HIV dan AIDS.

"Jumlah itu kami peroleh dari 89.122 tes yang telah dilakukan di sepanjang tahun ini ke sejumlah orang yang diduga mengidap HIV dan AIDS," kata Mike kepada wartawan, Kamis (4/1).

Kasus HIV dan AIDS ini, kata Mike, meningkat sebanyak 48 kasus dari tahun sebelumnya. Yang

mana pada tahun 2022 ada 746 kasus dan di tahun 2023 ada 794 kasus HIV dan AIDS.

Menurut Mike meskipun jumlahnya besar, namun jika dihitung dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Kasus ini memiliki presentasi yang kecil.

"Kalau evaluasi tingkat Jawa Barat Kabupaten Bogor berada di peringkat 2, paling banyak Kota Bandung," ungkapnya.

Bahkan di wilayah Kabupaten Bogor sudah ada Rumah Sakit yang melayani pasien HIV, tapi tidak semua hanya beberapa.

"Ada 11 layanan puskesmas, 4 RSUD dan tiga Rumah Sakit yakni RSPG, Sentra Medika, dan RSAU dr. M. Hassan Toto Kemang," Pungkasnya. ●gio

Pemkab Bogor Sinergi dengan BPTJ Terapkan Reformasi Angkutan Massal



Pemkab Bogor bersinergi dengan BPTJ untuk mengatasi kemacetan di daerah itu.

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bertekad menangani permasalahan kemacetan di wilayah Kabupaten Bogor bersinergi dengan Pemerintah Pusat, melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menerapkan rencana operasional Sarana Angkutan Umum Massal terintegrasi di Kabupaten Bogor.

Nota kesepakatan dan Pembahasan Program Subsidi Angkutan Umum Layanan Buy The Service (BTS) Kabupaten Bogor, dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Rabu (3/1).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerangkan, strategi penanganan kemacetan di Kabupaten Bogor salah satu strateginya adalah pemenuhan transportasi massal dengan skema BTS angkutan massal yang sudah digagas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).

"Kolaborasi ini kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten juga Kota Bogor. Pemerintah hadir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yakni Pasal 138-

139 di mana pemerintah wajib hadir menyediakan transportasi aman, nyaman dan terjangkau," terangnya.

Selanjutnya, Kepala Dishub Kabupaten Bogor, Agus Ridhalla menyampaikan, rencana reformasi transportasi sudah dicanangkan dan ditetapkan bahkan beberapa koridor sudah ada di dalam Peraturan Bupati (Perbup) itu.

Rencana operasionalnya mulai dari Cileungsi-Sentul, kemudian Bojoggede-Sentul Selatan, Bojoggede-Parung, Laladon-Jasinga, Ciawicigombong dan Ciawicisarua.

Untuk koridor tujuh yakni rute Ciparigi-Cibinong, berdasarkan hasil kajian koridor Ciparigi-Cibinong totalnya sepanjang 11,47 km dilengkapi dengan halte.

"Karena menyangkut dua wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, program ini sudah kita bahas kemarin. Sudah kami bahas juga dengan Organda melalui pola sosialisasi untuk menciptakan kesepakatan. Reformasi angkutan umum di Kabupaten Bogor sangat penting," ujarnya. ●gio

8 | Nusantara



PEMBATASAN VAKSIN COVID-19 GRATIS

Vaksinasi bersiap untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga di Puskesmas Arcamanik, Bandung, Jabar, Kamis (4/1). Kemenkes telah menetapkan vaksin COVID-19 akan dikenai biaya bagi masyarakat yang tidak dalam termasuk kelompok rentan sejak awal Januari 2024.

Ketua DPRD Bogor: Pembangunan SDM Berkualitas Jadi Tantangan di 2024

"Di tahun politik 2024 ini, kita harus punya komitmen menjaga kondusifitas sambil menjalankan rencana dan program strategis dalam membangun kualitas SDM dan menjaga stabilitas ekonomi," Kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

CIBINONG (IM)- Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia sekaligus penyediaan lapangan kerja menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat di tahun 2024.

"Dua hal ini, jangan sampai terganggu karena semua konsentrasi pemerintah di 2024 tersedot pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang prosesnya berlangsung sepanjang tahun ini," kata Rudy di Cibinong, Bogor, Rabu.

Menurut dia, jika dua hal ini terabaikan, akan menjadi

ganjalan bonus demografi termanfaatkan dengan baik. Bahkan, bisa berbalik menjadi beban bagi pembangunan Kabupaten Bogor.

Karena, Kabupaten Bogor sedang mengalami bonus demografi di mana rasio ketergantungan penduduk usia non produktif di bawah angka 50 per seratus penduduk.

"Di tahun politik 2024 ini, kita harus punya komitmen menjaga kondusifitas sambil menjalankan rencana dan program strategis dalam membangun kualitas SDM dan menjaga stabilitas ekonomi," cetus dia.

Rudy menyebutkan, hingga akhir 2023 capaian sektor pendidikan kurang mengembirakan. Argumentasi tersebut merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka rata-rata lama sekolah hanya 8,37 tahun di 2023.

"Ini artinya, penduduk Kabupaten Bogor usia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan sampai SMP Kelas dua," tuturnya.

Data tersebut, kata dia, menunjukkan kenaikan rata-rata lama sekolah selama periode 2021 hingga 2023 hanya tumbuh 0,06 poin, yakni dari 8,31 di tahun 2021 tumbuh menjadi 8,37 di tahun 2023.

Adapun angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Bogor untuk kelompok usia 7-12 dan 13-15 hingga kini belum mencapai 100 persen. Pada 2022 APS tercatat 98,74 persen pada usia 7-12 tahun, sedangkan pada usia 13-15 tahun sebesar 95,49 persen. Artinya tidak semua anak usia sekolah di Kabupaten Bogor mengenyam pendidikan sekolah dasar.

Beberapa faktor, kata

Rudy, disinyalir menjadi penyebab seperti faktor ekonomi, kemalasan, pengaruh lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, tuntutan ekonomi lebih besar pada kelompok umur 16-18 tahun dimana mereka dianggap sudah mampu untuk bekerja.

La mengatakan iklim usaha di tahun politik juga harus tetap terjaga. Pada Agustus 2023, data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi, yakni 8,47 persen, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 64,22 persen.

Sehingga, dari 100 penduduk Kabupaten Bogor berusia 15 tahun hanya 64 hingga 65 penduduk yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi.

"Angka ini meningkatkan tidak signifikan dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 63,75 persen. Peningkatan TPAK tersebut menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Bogor pada Agustus 2023 lebih banyak dibandingkan

yang tersedia pada Agustus 2022," terang Rudy.

Adapun, dari jumlah itu, sektor industri mendominasi penyerapan tenaga kerja sebesar 63,11 persen menggeser sektor industri pengolahan 29,29 persen dan sektor pertanian 7,6 persen.

Namun, lanjut dia, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pun tidak berjalan linier dengan tingkat pendidikan angkatan kerja.

"Keterbatasan lapangan kerja membuat tidak semua tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dapat terserap," kata dia.

Akibatnya, banyak ditemui pengangguran dengan pendidikan tinggi.

"Karena itu sekali lagi, saya mengingatkan di tengah euforia tahun politik 2024, kita harus menjaga kondusifitas, jangan sampai mengabaikan agenda kita untuk membangun SDM berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang sehat agar tenaga kerja terserap dengan baik," tandas dia. ●gio

Pj. Bupati Bogor Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024

CIBINONG (IM)-Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024, di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (3/1).

Pj. Bupati Bogor mengikuti rakor bersama perwakilan Forkopimda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Hadir secara virtual, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Dalam arahannya, Men-

teri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dan berada di posisi 4,94%, ini lebih baik daripada negara-negara yang lebih maju, bahkan Indonesia berada di atas Amerika.

"Kemudian kalau kita lihat di daerah, ada provinsi yang bagus sekali pertumbuhan ekonominya melampaui nasional, salah satunya Maluku Utara," jelas Tito.

Tito menerangkan, berkaitan dengan inflasi, posisi Indonesia berada pada urutan ke-53 terendah dari 186 negara di dunia. Di negara G20, inflasi kita masuk peringkat tujuh yang terendah, 16 negara lainnya seperti Jepang, Amerika, dan yang lainnya inflasinya lebih tinggi dari Indonesia. Inflasi tahun ke tahun kita pada bulan Desember 2023 yakni di angka 2,61%, turun dari angka sebelumnya yakni 2,86%.

"Jadi berita baiknya, infla-

si kita relatif terjaga, namun jangan sampai terlena karena tren bulan ke bulannya ada peningkatan sehingga perlu ada langkah-langkah yang diambil," terang Tito.

La menuturkan, mengelola negara Indonesia jauh lebih sulit, karena sebagai negara nomor satu terbesar di Asia Tenggara, dan nomor empat terbesar di dunia, kita mampu mengendalikan inflasi di tengah kompleksitas masalah.

"Kita jangan pernah bosan mengendalikan inflasi karena ini menyangkut stabilitas harga bahan pangan. Berbagai survei yang ada mengkonfirmasi ada dua isu utama di masyarakat yakni tentang lapangan pekerjaan dan stabilitas harga bahan pangan," tukasnya.

Mengingat gejala di berbagai negara dipicu oleh masalah pangan, yang berdampak pada gejolak politik dan keamanan," tutur Mendagri Tito Karnavian. ●gio



Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, saat mengikuti Rakor pengendalian inflasi 2024 bersama Mendagri.

Pemkab Cirebon Diminta Manfaatkan Aset Daerah dengan Sistem KPBU

CIREBON (IM)- Untuk mendongkrak dan memaksimalkan PAD, Pemkab Cirebon diminta segera memanfaatkan aset-aset daerah yang saat ini masih belum digunakan.

Caranya dengan memakai sistem Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan memakai sistem ini, diharapkan Pemkab bisa menggali potensi aset daerah menjadi PAD. Demikian dikatakan Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon Sugianto.

Sugianto menjelaskan, sistem KPBU ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 96, tahun 2016. Isinya tentang, pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama Pemda dengan Badan usaha, untuk penyediaan infrastruktur di Daerah.

Dia menilai, keberadaan infrastruktur yang dapat diproyeksikan dengan sistem KPBU, tentunya bisa menjadi Potensi aset Kabupaten Cirebon. Itu pun sudah ditegaskan dalam Perpres nomor 38 tahun 2015, pasal 5 ayat 2. Isinya adalah, infrastruktur air minum dan infrastruktur pengelolaan Persampahan.

"Ada juga infrastruktur Fasilitas pendidikan,

infrastruktur sapsra olah raga serta kesenian, infrastruktur

Pariwisata serta Infrastruktur Perumahan Rakyat. Nah ini bisa memakai sistem KPBU," kata Sugianto, Kamis (4/1).

Dengan adanya penguatan regulasi tersebut lanjutnya, Pemkab Cirebon bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan usaha, memakai sistem KPBU. Hal ini bisa dilakukan, tentunya dengan cara Pemkab memberikan kemudahan Perijinan investor untuk melakukan investasi di daerah.

Sugianto mencontohkan, pemanfaatan aset daerah yang dimiliki, bisa dengan cara sewa menyewa atau dengan sistem tukar guling. Tujuannya tetap, yaitu menggali potensi PAD. Masalahnya, pada tahun ini Pemkab Cirebon dituntut mampu mengubah minset Birokrasi. Perubahan ini salah satunya, untuk mempercepat pelayanan publik.

"Dalam rangka mewujudkan problema tersebut, diharapkan Bupati Cirebon jangan ragu untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan APH. Libatkan Kejaksaan dan kepolisian untuk pendampingan hukum. Mereka akan bagian dari FortKopimda juga," tukasnya. ●pra